



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

TAHUN 2018-2023

**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2019 dapat sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Renstra ini disusun sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategik (RENSTRA) 2019-2023.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2019 ini merupakan wujud kerja pelaksanaan pembangunan dan realisasi Rencana Strategik Kota Palembang, yang berisi hasil – hasil pembangunan yang telah dicapai Tahun 2019 maupun penyerapan dana APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2019.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa akan memberikan taufik dan hidayah-Nya serta Perlindungan-Nya bagi Kita, Aamiin.

Palembang, Juli 2019

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang**



Drs. H. M. Yanurpan Yany, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196904031990091002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap Kepala Daerah harus mempunyai Visi dan Misi dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sehingga diperlukan rencana-rencana strategis. Rencana strategis tersebut haruslah terukur dan berkesinambungan dan mendukung program pemerintah yang lebih tinggi. Rencana strategis dimulai dengan melihat Visi dan Misi Walikota Palembang Terpilih 2019-2023.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas/Badan/Kantor/ adalah termasuk pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kapasitas sebagai pengguna anggaran yang wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Rencana Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (1-5 tahun) dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat suatu rencana strategis yang akan mendukung kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palembang, Tahun 2019-2023.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008.

6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.
17. Keputusan Walikota Palembang Nomordan Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palembang merupakan lembaga Unsur SKPD Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi Palembang EMAS 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kota Palembang tahun 2017-2018 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, telaahan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih, telaahan renstra kementrian/lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode lima tahun dan rincian target capaian tahunannya.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PALEMBANG

Berisikan uraian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang merupakan lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palembang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas komunikasi dan Informatika Kota Palembang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

A. TUGAS :

“ Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

B. FUNGSI :

1. Memimpin kegiatan dinas dan urusan kesekretarisan serta bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
2. Penyusun visi, misi dan Rencana Strategis Dinas.
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi; Pengembangan Komunikasi dan Informatika; Informasi Publik; Diseminasi Informasi dan Perdayaan Telematika, Pos dan Telekomunikasi.
4. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
5. Pelaksanaan Komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur pemerintah kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Evaluasi dan Pelaporan.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

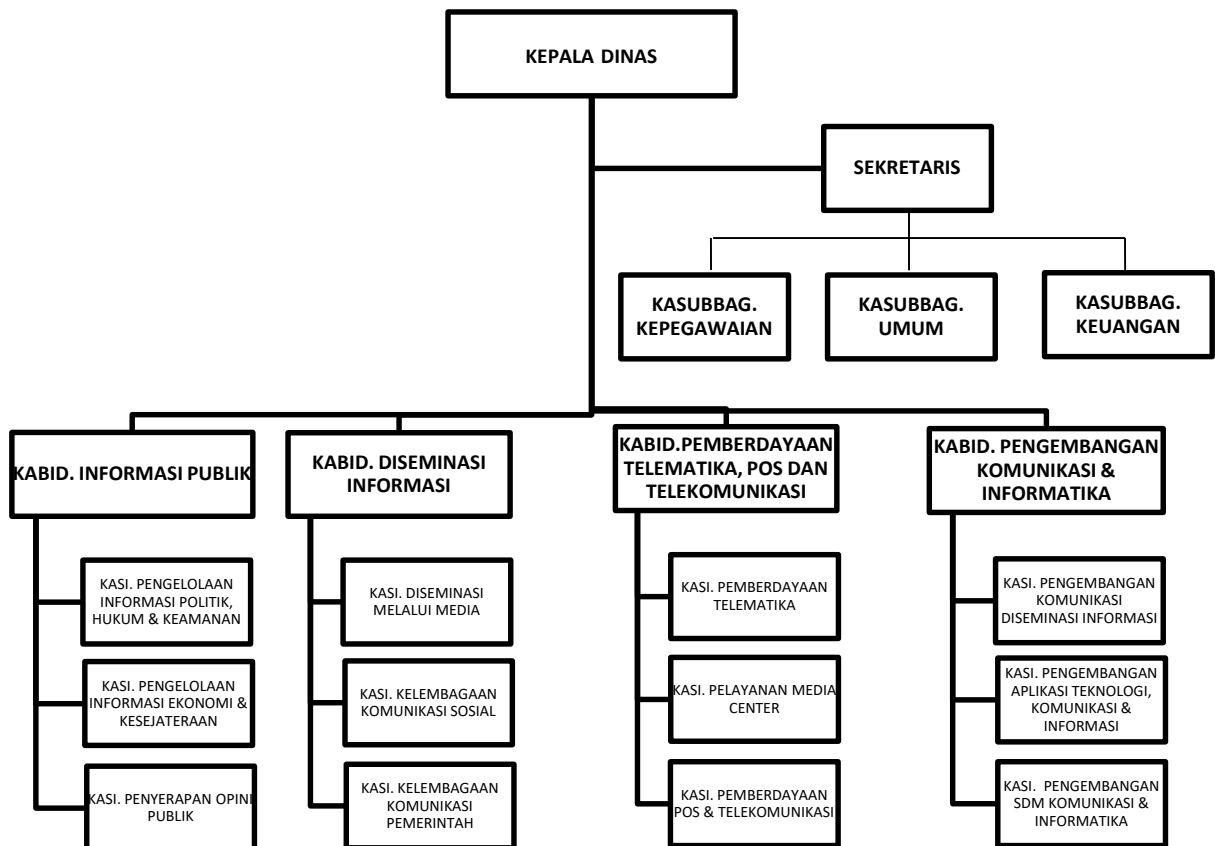
B. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yang terdiri dari : Satu Orang Kepala Dinas, Satu Orang Sekretaris, Empat Orang Kabid, serta 15 Orang Kepala Seksi. Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretaris**
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubbag Keuangan
 - c. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
- 3. Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik**
 - a. Kasi Pengelolaan Opini Publik
 - b. Kasi Pengelolaan Informasi Publik
 - c. Kasi Layanan Informasi Publik
- 4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik**
 - a. Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - b. Kasi Pelayanan Media Center dan Hubungan Media
 - c. Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik
- 5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian**
 - a. Kasi Teknologi dan Komunikasi
 - b. Kasi Pengelolaan Data dan Statistik
 - c. Kasi Persandian dan Keamanan Informasi
- 6. Kepala Bidang Pengelolaan E-Government**
 - a. Kasi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi
 - b. Kasi Infrastruktur E-Government
 - c. Kasi Tata Kelola Pengembangan E-Government

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG**



Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

I. SEKRETARIAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
5. Penyediaan adminitrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihaa kantor
7. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
8. Penyediaan alat tulis kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11. Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan makanan dan minuman
14. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah
15. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
16. Penyediaan jasa kebersihan kantor
17. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Pengadaan pakaian kerja lapangan
4. Senam Kesegaran Jasmani\

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan LAKIP, Renstra , dan Ranja (Rencana Kinerja)
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4. Penyusunan laporan keuangan triwulan
5. Penyusunan RKA SKPD
6. Evaluasi DPA dan DPPA dalam rangka penyusunan anggaran kas

II. BIDANG PENGELOLAAN OPINI DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
3. Pengadaan alat studio dan komunikasi
4. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
5. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

III. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sumberdaya Aparatur

Sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang tercatat sampai dengan bulan Oktober 2013 berjumlah 45 orang pegawai negeri sipil dan 26 orang tenaga kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Per Oktober 2017-2018

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala Dinas	1						1
2	Bidang Sekretaris	13		1	2		7	3
3	Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik	6				1	2	3
4	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	7			1	2	2	2
5	Bindang Teknologi Informasi dan Persandian	5					3	2
6	Bidang Pengelolaan E-Goverment	5					1	4
Jumlah		37		1	3	3	15	15

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Non PNS Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
KotaPalembang, Menurut Tingkat Pendidikan Formal Dan Jenis Kelamin
Per Oktober 2017-2018

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala Dinas							
2	Bidang Sekretaris	14	3		3	2	5	1
3	Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik	5			3	1	1	
4	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	8			2	1	5	
5	Bindang Teknologi Informasi dan Persandian	4			1		3	
6	Bidang Pengelolaan E-Government	9			3		6	
Jumlah		40	3		10	4	17	

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang, Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon Tahun 2013

No	Sub SKPD	Jml	Pangkat/gol.				Eselon		
			I	II	III	IV	IV	III	II
1	Kepala Dinas	1				1			1
2	Bidang Sekretaris	13		5	5	3	2	1	
3	Bidang Pengembangan Komunikasi dan Informatika	8			6	2	3	1	
4	Bidang Pemberdayaan telematika, Pos dan Telekomunikasi	10		1	5	4	3	1	
5	Bindang Diseminasi Informasi	8		2	4	2	3	1	
6	Bidang Informasi Publik	5			5		3	1	
Jumlah		45		8	25	12	14	5	1

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang tahun 2013

No	Sub SKPD	Jml	Nama Diklat Struktural		
			Adum/Diklat PIM IV	Spama/ Diklat PIM III	Spamen/ Diklat PIM II
1	Kepala Dinas	1			1
2	Bidang Sekretaris	13	3	1	
3	Bidang Pengembangan Komunikasi dan Informatika	8	3	1	
4	Bidang Pemberdayaan telematika, Pos dan Telekomunikasi	10	3	3	
5	Bindang Diseminasi Informasi	8	2	1	
6	Bidang Informasi Publik	5	3	1	
Jumlah		45	14	7	1

2. Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2017-2018

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Gedung Kantor	2		2	
2	Rumah Dinas	1		1	
3	Gudang	1	1		
4	Musholah	1	1		
5	Tempat Parkir	1	1		
6	Kendaraan Roda Empat	13	7	5	
7	Kendaraan Roda Dua	40	30	10	
8	Ruang Media Center	1	1		

9	Mesin Tik	5	3	2	
10	PC	24	14	10	
11	Laptop				
12	Sistem informasi	1	1		
13	Jaringan inforkom	1	1		

2.3. Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2007-2018 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (*Treaths*) yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

1. Tantangan (Threats) :

- a) Pesatnya perkembangan teknologi informasi
- b) Masih terbatasnya pengetahuan SDM aparat bidang teknologi informasi.
- c) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik dan transparan
- d) Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sarana komunikasi.
- e) Pelimpahan kewewenang masih sangat terbatas

Peluang-peluang (*Opportunities*) pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :

2. Peluang (Opportunities) :

- a) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat /pendidikan formal bagi Aparatur
- b) Adanya perkembangan jaringan informasi yang beroperasi di wilayah Kota Palembang.
- c) Tingginya kebutuhann masyarakat terhadap sarana komunikasi.
- d) Dukungan Pegawai Dinas Instansi dalam tugas tugas Pemerintahan
- e) Adanya dukungan dari Pemerintah pusat dan daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Terbatasnya SDM aparat bidang Komunikasi dan Informasi
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan
3. Kurangnya Kuantitas pegawai
4. Belum standarnya Pelayanan Operasional Prosedur
5. Terbatasnya anggaran kegiatan pelaksanaan program

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Walikota

Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kota yaitu "PALEMBANG EMAS TAHUN 2018". Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Palembang merumuskannya dalam enam Misi Kota. Ke enam Misi Kota Palembang Tahun 2017-2018 adalah:

1. Meningkatkan teknologi informasi komunikasi dan peran mass media dalam mewujudkan pelayanan publik
2. Peningkatan SDM dan sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika yang handal
3. Peningkatan, pemberdayaan masyarakat terhadap penggunaan TIK.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang berkaitan langsung dengan Misi Kota Palembang yang ke 1 (satu) yaitu Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat.

Beberapa permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Kota Palembang yang ke 1 (Satu) "Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat " adalah sebagai berikut.

1. Terbatasnya SDM aparat Bidang Komunikasi dan Informasi.
2. Kurangnya / Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

3. Masih kurangnya kuantitas pegawai agar terciptanya pemerintahan yang baik / Good Governance.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

1. Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kementrian Komunikasi dan Informatika, maka ditetapkan **Visi Kementrian Komunikasi dan Informatika**, yaitu **“Terwujudnya Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Misi Kementrian Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya indonesia informatif dalam kerangka NKRI.
- b. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan integritas moral tinggi
- c. Mendorong peningkatam tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa.
- d. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
- e. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kementrian Komunikasi dan Informatika teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, antara lain:

- a. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
- b. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
- c. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai kendala internal Kementrian Komunikasi dan Informatika yang harus ditekan serendah mungkin, dan diminimasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang antara lain:

- a. Semakin pesatnya daya saing tingkat teknologi informasi.
 - b. Masih kurangnya dan terbatasnya SDM mengenai komunikasi dan informasi.
 - c. Masih kurangnya kuantitas pegawai agar terciptanya pemerintahan yang baik / Good governance.
2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan **Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan**, yaitu **“Sumatera Selatan yang bersatu, lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing global dengan menerapkan otonomi daerah secara murni dan konsekuen”**.

Dengan **Misi** Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah ke arah realitas pemerintahan yang baik untuk memacu kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- b. Mengoptimalkan pendayagunaan potensi berbagai sumberdaya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan daya saing Sumatera Selatan terhadap pasar regional, nasional, dan internasional.
- c. Meningkatkan pengembangan bidang – bidang unggulan guna mempercepat pengembangan industri serta peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.
- d. Meningkatkan kemandirian kabupaten / kota melalui penguatan kemampuan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah ke arah realitas pemerintahan yang baik untuk memacu kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha.
- b. Mengoptimalkan pendayagunaan potensi berbagai sumber daya n secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan daya saing Sumatera Selatan terhadap pasar regional, nasional dan internasional.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai kelemahan internal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang harus ditekan serendah mungkin, dan diminimasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang antara lain:

- a. Meningkatkan pengembangan bidang – bidang unggulan guna mempercepat pengembangan industri serta peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.
- b. Meningkatkan kemandirian kabupaten / kota melalui penguatan kemampuan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang mengembangkan rencana pembangunan di bidang komunikasi dan informasi di masa yang akan datang.

Berdasarkan penelaahan aspek-aspek RTRW, yang meliputi:

1. Struktur tata ruang saat ini;
2. Rencana struktur tata ruang;
3. Pola ruang saat ini;
4. Rencana pola ruang; dan
5. Rencana Indikasi program pemanfaatan ruang.

memberikan kesempatan dan peluang kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas – tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Program Pemanfaatan Ruang yang direncanakan diharapkan dapat mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembangunan. Maka Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palembang melaksanakan sebagian urusan pemerintah sesuai dengan bidang dan tugas – tugasnya, mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya, penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Walikota.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi

Selaku Satuan Kerja Tingkat Daerah (SKPD) tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, adalah membantu Walikota

dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan Informatika.

Merumuskan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi kesekretariatan, diseminasi informasi publik, pemberdayaan telematika, pos dan telekomunikasi, Pengembangan Komunikasi dan Informatika.

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah sesuai dengan bidang tugas-tugasnya; Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atau pelaksanaan tugasnya, Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota.

Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan .Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kab/Kota dan **Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008** Tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang bahwa bidang Komunikasi Dan informatika mempunyai kedudukan, Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :

a. Kedudukan

- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang adalah unsur pelaksana urusan daerah dibidang Komunikasi dan informatika berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

b. Tugas

Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas tugas pembantuan dibidang Komunikasi dan Informatika .

c. Wewenang

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas komunikasi Dan Informatika Kota Palembang sesuai dengan **Peraturan Walikota Palembang No.18 Tahun 2008** untuk bidang Komunikasi dan Informatika melaksanakan kewenangan pemerintahan Kota Palembang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: :

a. Bidang Pos Dan Telekomunikasi meliputi;

1. Penyelenggaraan pelayanan pos
2. Pemberian Rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
3. Pemberian Izin Jasa Titipan untuk kantor agen
4. Penertiban Jasa titipan untuk kantor agen

- b. Bidang Telekomunikasi
1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan.
 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban untuk pembangunana kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
 4. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
 5. Pengawasan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikas yang cakupan arenya kota, pelaksanaan pembangunana telekomunikasi, penyelenggaraan Wartel,Warung seluler atau sejenisnya.
 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
- c. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota.
 3. Pemberian izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan).
 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.
 5. Pemberian izin instalansi genset.

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Dinas sebagai Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai Dinas yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan kebijakan dan informasi pembangunan Pemerintah Kota Palembang dengan berbagi media dan sarana komunikasi secara sinergi kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi masyarakat baik melalui media elektronik, cetak , tradisional, pameran, tatap muka, dan media luar ruang.
2. Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat untuk mendapatkan informasi timbal balik dan mengkomunikasikan program pembangunan Pemerintah Kota Palembang bidang Komunikasi dan Informasi melalui diseminasi /

Penyebarluasan melalui multi media.

3. Lengkapnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan erat kaitannya dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan, bagaimana mutu pelayanan akan baik jika tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kota Palembang, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-vcita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu

4.1. Visi dan Misi Dinas Kota Palembang

1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM TAHUN 2023”, maka ditetapkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

” Terwujudnya Palembang yang Informatif , maju dan profesional yang berbasis teknologi dan mass media ”

2. Misi

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, sebagai berikut:

“Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional”.

Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4.1						
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2019-2023						
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang						
VISI : " Terwujudnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yang Profesional "						
MISI I : 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Peran mass media dalam mewujudkan pelayanan informasi publik.						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
2.1 Mewujudkan Pelayanan Prima	2.1.1	Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan PD	2.1.1.1	Strategi mengoptimalkan kinerja pelayanan PD	2.1.1.1.1	Arah kebijakan melakukan pembinaan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, SDM dan sistem laporan pencapaian kinerja keuangan
2.2 Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Informasi Pembangunan	2.2.1	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Pembangunan	2.2.1.1	Strategi mengoptimalkan media center sebagai sarana untuk melakukan penyebaran informasi, kerjasama informasi dengan mass media dan pengelolaan opini dan komunikasi publik	2.2.1.1.1	Arah kebijakan melakukan pembinaan di bidang penyebaran informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
2.3 Mewujudkan Palembang Smart City	2.3.1	Terimplementasinya E-Government	2.3.1.1	Strategi pengembangan komunikasi dan informasi serta pelayanan administrasi daerah berbasis TIK.	2.3.1.1.1	Arah kebijakan melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan, sumberdaya, dan sistem informasi berbasis TIK

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Tujuan:

- 2.1 Mewujudkan Pelayanan Prima.
- 2.2 Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Informasi Pembangunan.
- 2.3 Mewujudkan Palembang Smart City.

Sasaran:

- 2.1.1 Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan PD.
- 2.2.1 Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Pembangunan.
- 2.3.1 Terimplementasinya E-Government

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.1

4.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2019-2023, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi

2.1.1.1 Strategi mengoptimalkan kinerja pelayanan PD

2.1.1.2 Strategi mengoptimalkan media center sebagai sarana untuk melakukan penyebarluasan informasi, kerjasama informasi dengan mass media dan pengelolaan opini dan komunikasi publik.

2.1.1.3 Strategi pengembangan komunikasi dan informasi serta pelayanan administrasi daerah berbasis TIK.

b. Kebijakan

2.1.1.1.1 Arah kebijakan melakukan pembinaan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, SDM dan sistem laporan pencapaian kinerja keuangan.

2.2.1.1.1 Arah kebijakan melakukan pembinaan di bidang penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

2.3.1.1.1 Arah kebijakan melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan, sumberdaya, dan sistem informasi berbasis TIK.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2019-2023 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Informasi, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2019-2023.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

5.1 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang selama 5 tahun dari APBD Kota Palembang Tahun 2019-2023 ditargetkan sebesar Rp. 49,786,548,332.00,- Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1.